

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

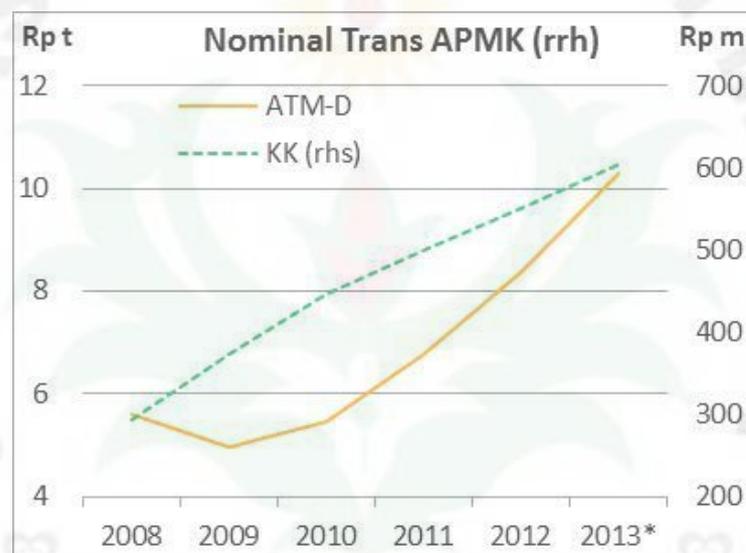
Dahulu perencanaan keuangan digunakan pada perusahaan untuk merencanakan keuangan kedepannya. Namun, saat ini perencanaan keuangan tidak hanya untuk perusahaan. Perencanaan keuangan juga dibutuhkan oleh industri kecil, industri rumahan, rumah tangga bahkan untuk pribadi. Panigoro 2011 (dalam Jurnal JIBEKA Peter Garlans Sina).

Peran sistem pembayaran kartu kredit dalam mendukung aktivitas ekonomi dalam melakukan transaksi ialah untuk menjamin terlaksananya transaksi masyarakat dan dunia usaha. Berbagai kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran di tempuh Bank Indonesia dengan tetap berfokus pada 4 (empat) aspek utama, yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.

Kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya, sehingga masyarakat memilih kredit sebagai salah satu alternatif pembiayaannya dengan tujuan memberikan potensi untuk menghemat modal, pembiayaan keuangan yang tetap, memperluas jarak keuangan, memungkinkan penganggaran kas yang lebih fleksibel, menyediakan pembiayaan total, menyediakan pembiayaan akuisisi ditambah biaya-biaya terkait, menyediakan perlindungan terhadap inflasi, menyediakan pembiayaan yang cepat dan fleksibel, mempermudah pembukuan, mengurangi resiko keuangan, dan investasi.

Pembiayaan secara kredit memiliki tujuan yang menguntungkan para debitur sehingga para debitur memanfaatkan secara tidak wajar dan tidak sesuai kebutuhan maupun kantongnya.

Gambar 1.1. Nominal Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
(Sumber : Bank Indonesia, diolah)



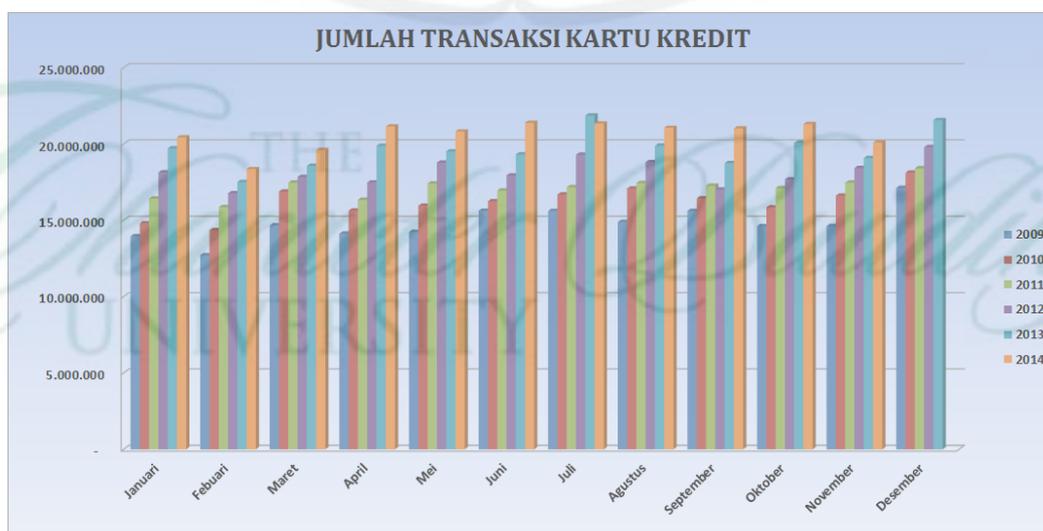
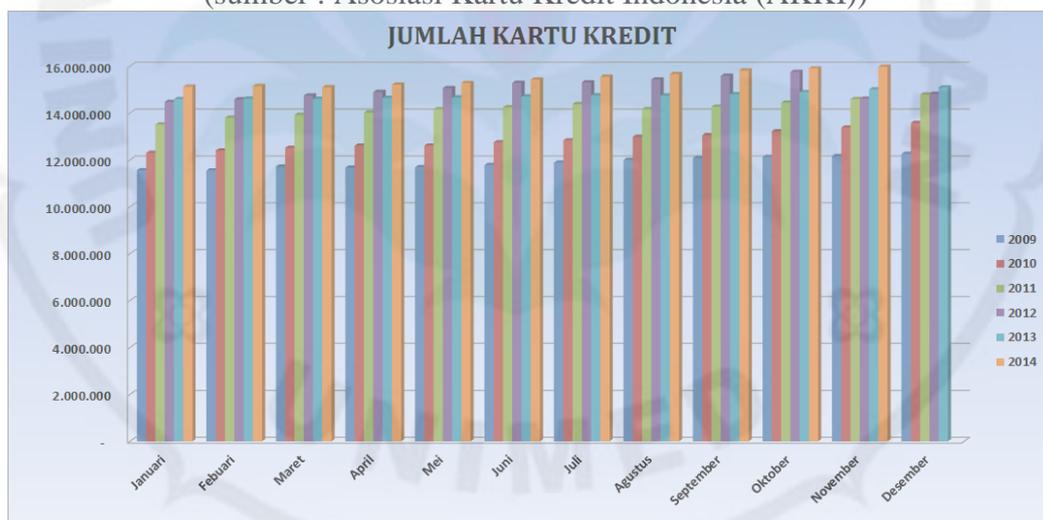
Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2012 dari Rp8 triliun menjadi Rp 10 triliun dan kartu kredit mencapai Rp 600 miliar per hari.

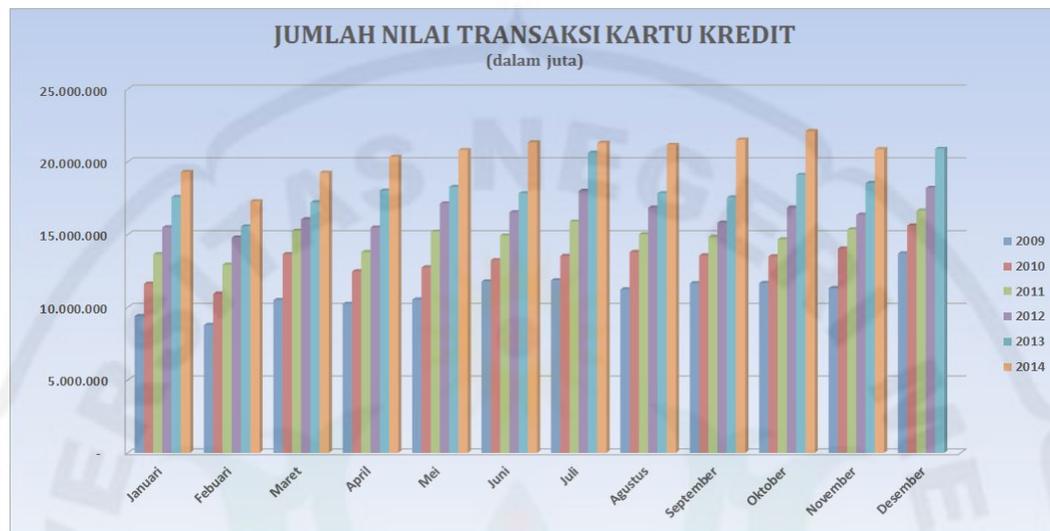
Permintaan kartu kredit semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, penggunaan kartu kredit selama tahun 2013 mencapai 15.091.684 kartu dan di tahun 2014 hingga bulan November 2014 mencapai 15.979.352 kartu. Hal ini menunjukkan minat individu terhadap penggunaan kartu kredit meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kartu kredit memberikan kecenderungan peningkatan volume transaksi. Volume transaksi total kartu kredit dari tahun 2009 hingga 2013 memiliki trend meningkat. Pada tahun 2013, volume transaksi menjadi 235.695.969 transaksi dengan nilai transaksi Rp 219.026.985 juta. Dalam jangka waktu 11 bulan (November 2014), volume transaksi menurun menjadi

226.571.622 dengan nilai yang meningkat Rp 225.274.306 juta.

Tahun	Jumlah Kartu	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi (Juta)
2009	12.259.295	177.817.542	132.651.567
2010	13.574.673	194.675.233	158.687.057
2011	14.785.382	205.303.560	178.160.763
2012	14.817.168	217.956.183	197.558.986
2013	15.091.684	235.695.969	219.026.985
November 2014	15.979.352	226.571.622	225.274.306

Tabel 1.1 Jumlah Kartu Kredit, Jumlah Transaksi dan Nilai transaksi (sumber : Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI))





Gambar 1.2. Perkembangan Kartu Kredit
(Sumber : AKKI)

Sebagai alat hutang, perhatian BI terhadap kartu kredit harus lebih ditingkatkan lagi, terutama yang berhubungan dengan kualitas aspek manajemen risiko. Pelaksanaan diatur secara ketat, sebab berpotensi terjadi penggelembungan (bubble) kartu kredit apabila pemakaiannya dilakukan berlebihan. Untuk itu BI mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/27/DASP sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penerbit Kartu Kredit melakukan identifikasi dan memilah data Pemegang Kartu Kredit berdasarkan kriteria batas minimum usia, batas minimum pendapatan tiap bulan, batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan, dan batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit. Pemegang Kartu Kredit tidak memenuhi batas minimum usia yang dipersyaratkan, yaitu: (1) 21 tahun atau telah kawin untuk Pemegang Kartu Kredit utama. (2) 17 tahun atau telah kawin untuk Pemegang Kartu Kredit tambahan. Pemegang kartu kredit harus memiliki gaji sekurang – kurangnya 3 juta rupiah

dan juga hanya boleh memegang maksimal 2 kartu kredit. Total plafon Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit apabila total plafon tersebut lebih dari 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan Pemegang Kartu Kredit. Pengetatan peraturan ini penting sebab penerbit kartu kredit dapat menemukan pemegang kartu yang tepat sasaran dan dapat meminimalisir terjadinya resiko gagal bayar oleh pengguna.

Data AKKI (Asosiasi kartu Kredit Indonesia) menyebut, ada 50.000 nasabah Bank Mandiri yang bergaji di bawah Rp 10 juta, tetapi memiliki kartu kredit banyak. Presiden Direktur PT Visa WorldWide Indonesia mengatakan bahwasanya pembayaran menggunakan kartu Visa di Medan berkembang mencapai 20% pada triwulan I-2014 dibandingkan tahun sebelumnya. "Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Medan yang 6,01 persen. Dua tahun terakhir, penerimaan kartu kredit di Kota Medan berkembang sampai 47% dengan nilai rata-rata transaksi sebesar Rp 1,046 juta. Kenyataan itu menunjukkan volume pembayaran nontunai dengan menggunakan kartu Visa di Medan berada di kelompok lima besar kota Tier 2 (sebaran di luar Jakarta) bersama Surabaya, Bali, Semarang dan Bandung.

Yang menjadi sebuah permasalahan bagi orang yang melakukan pembelian, karena jika dalam diri mereka tidak tersedia cukup dana untuk melakukan sebuah aktivitas berbelanja maka salah satu jalannya adalah dengan berhutang atau di waktu sekarang bisa dengan menggunakan kartu kredit. Jika kondisi tersebut terjadi berulang-ulang, maka hutang para pelaku perilaku konsumtif akan semakin banyak dan akibatnya akan menimbulkan masalah keuangan bagi dirinya. Kondisi

seperti ini didukung oleh Roberts (1998) yang mengatakan bahwa meningkatnya kebangkrutan individu dan penggunaan kartu kredit yang melebihi batas merupakan bagian dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat perilaku perilaku konsumtif.

Secara riil kehadiran kartu kredit di tengah-tengah masyarakat, telah meningkatkan minat dan keinginan belanja bagi pemilik kartu. Seseorang dapat berbelanja melebihi pendapatan dan penghasilan setiap bulan, karena pembayarannya dapat dikredit. Ini logika yang mendasari praktik rentenir, beli apa saja silahkan, asal setiap bulan membayar bunga. Hutang pokok tidak perlu dilunasi yang penting bunga setiap bulan. Maka George Ritzer (2006) menyebut kartu kredit sebagai "lintah darat plastik". Kartu kredit telah menguatkan hutang dari segala lapisan masyarakat, dan lapisan sosial, karena tidak saja orang yang kaya yang bisa memiliki kartu kredit, tetapi pegawai biasa, pengusaha biasa, mahasiswa, pelajar dengan cara komplen, bahkan pengangguran saja bisa mendapatkan kartu kredit, bila dia pandai dalam berdiplomasi, atau mengisi formulir pendaftaran walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya. Kartu ini mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif, fenomena gila belanja (*shopaholic*), berbudaya hutang dan menyalahgunakan kartu kredit (*addiction to credit card abuse*) yang dengan tanpa sadar membeli barang tidak menggunakan uang tunai, seolah-olah gratis tidak mengeluarkan uang, tapi secara tidak sadar hutangnya jadi banyak. Mereka telah terhegemoni dengan kartu kredit. Tanpa dengan paksaan mereka menggunakan kartu kredit.

Fenomena transaksi kartu kredit memang terus meningkat dari tahun 2009 hingga 2013 dan mengalami penurunan sedikit di tahun 2014., namun di sisi lain dalam menanggapi potensi pasar tersebut perlu diwaspadai bahwa nilai transaksi kartu kredit yang selalu meningkat tidak sepadan dengan pertumbuhan PDB Medan sementara NPL selalu menurun setiap tahunnya 2010 (4,63%) hingga sekarang 2014 (1,98%). Dari nilai transaksi yang selalu meningkat menandakan bahwa perilaku konsumtif juga semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat Medan. Walaupun demikian, faktor pendapatan terlihat kurang mempengaruhi resiko gagal bayar dari kartu kredit itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi acuan, faktor apakah yang dapat mempengaruhi resiko gagal bayar dari pemegang kartu tersebut.

Kepribadian dan situasi ekonomi mempengaruhi persepsi atau evaluasi konsumen terhadap kondisi ekonominya. Persepsi inilah yang mempengaruhi perilaku konsumen (Van Raaij dalam Sumarwan, 2003). Penggunaan kartu kredit yang tidak terkontrol akan menciptakan budaya konsumerisme, yang akhirnya dapat menimbulkan kepailitan atau kebangkrutan. Dengan membayar min pay 10% saja, tidak akan menghabiskan hutang, tapi hanya membuatnya semakin bertambah. Sebenarnya yang boleh memiliki kartu kredit bukan sembarang orang namun orang yang sudah mapan. Namun dalam sepuluh tahun terakhir justru sebaliknya.

Tujuan penelitian ini merupakan untuk memperoleh kejelasan mengenai debitur mana yang layak dan mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada sumber baik pembayaran pokok pinjaman maupun

bunganya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini terjadi dikarenakan begitu banyaknya pemberian kredit menghadapi resiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan dan yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan dari debitur itu untuk memenuhi kewajibannya yang mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif. Debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C menurut Gup and Kolari (2005), yaitu: *Character* (sifat/watak), *Capital* (modal sendiri), *Capacity* (kemampuan membayar), *Collateral* (jaminan/agunan), *Condition of Economy* (kondisi politik, sosial, ekonomi, budayanya), *Compliance* (kepatuhan terhadap hukum). Dari parameter tersebut akan digunakan untuk melihat hubungannya terhadap status kredit para debitur (*default* atau *non default*).

Mengetahui parameter tersebut maka dapat berguna bagi perusahaan pembiayaan (*consumer finance company*) dan debitur. Jika perusahaan tidak mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut maka perusahaan tidak bisa menekan jumlah kredit macet yang terjadi akibat dari debitur yang mengalami *default* tersebut. Sedangkan bagi debitur yang tidak mengetahui faktor-faktor karakteristik dari suatu hutang/kredit maka debitur dapat terjebak jika akan melakukan kredit, dalam hal ini debitur penting mengetahui faktor-faktor karakteristik dari suatu hutang/kredit, agar nantinya debitur lebih memahami kredit dan kemungkinan untuk *default* menjadi semakin kecil. Bukan hanya faktor-faktor karakteristik dari suatu hutang/kredit saja yang mempengaruhi *default* atau *non defaultnya* debitur tetapi juga faktor kebutuhan bahkan faktor emosi dalam memperoleh kepuasan tersendiri yang mengindikasikan perilaku

konsumtif. Perilaku konsumtif dapat berdampak terhadap resiko gagal bayar. Hal ini disebabkan berbagai fasilitas, kemudahan, dan kenyamanan yang diberikan membuat konsumen tidak menyadari dan tidak dapat mengontrol konsumsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah tersebut. Untuk itu pada tulisan ini, penulis memberi judul: **“Pengaruh Penggunaan Kartu Kredit (*Credit Card Usage*) dan Perilaku Konsumtif terhadap Resiko Gagal Bayar (*Default Risk*) (Studi Kasus di Marugame Udon, Sun Plaza Medan, Februari 2015)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, maka identifikasi masalah yang muncul ialah :

1. Penggunaan kartu kredit (*credit card*) berhubungan positif terhadap perilaku konsumtif pada pengguna kartu kredit (*card holder*) di Marugame Udon dan Tempura Sun Plaza Medan.
2. Penggunaan kartu kredit berhubungan positif terhadap risiko gagal bayar di Marugame Udon dan Tempura Sun Plaza Medan.
3. Perilaku konsumtif berhubungan positif terhadap risiko gagal bayar di Marugame Udon dan Tempura Sun Plaza Medan.
4. Penggunaan kartu kredit dan perilaku konsumtif berhubungan positif terhadap risiko gagal bayar di Marugame Udon Sun Plaza Medan.

1.3. Pembatasan Masalah

Kartu Kredit yang disalurkan kepada individual yang membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan konsumtif . Penelitian ini mengambil debitur

yang menggunakan kartu kredit di Marugame Udon Sun Plaza Medan pada bulan Februari tahun 2015 . Semua pembiayaan ini merupakan pembiayaan konsumen yang disalurkan secara individual, sehingga setiap hal yang berkaitan dengan kemampuan bayar berhubungan dengan kemampuan bayar dari debitur, baik yang berasal dari gaji, pendapatan usaha, maupun pendapatan lain-lainnya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut : “Adakah Pengaruh Penggunaan Kartu Kredit (*Credit Card Usage*) dan Perilaku Konsumtif terhadap Resiko Gagal Bayar (*Default Risk*) (Studi Kasus di Marugame Udon, Sun Plaza Medan, Februari 2015)?”

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat konsumen tentang penggunaan kartu kredit (*credit card*).
2. Untuk mengetahui risiko gagal bayar (*default risk*).
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan kartu kredit (*credit card*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko gagal bayar (*default risk*).
4. Untuk mengetahui apakah penggunaan kartu kredit (*credit card*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif.
5. Untuk mengetahui apakah perilaku konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko gagal bayar (*default risk*).

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya ingin memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk peneliti sendiri, pihak akademik dan , pihak perusahaan pembiayaan (*consumer finance company*) sekaligus masyarakat umum.

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai penggunaan kartu kredit (*credit card*) dan akibat terjadinya wanprestasi (*default risk*) sehingga memperoleh pembelajaran tentang *personal finance* yang terencana.
2. Bagi akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memberi sumbangan mengenai penggunaan kartu kredit (*credit card*) dan akibat terjadinya wanprestasi (*default risk*).
3. Bagi masyarakat umum, semoga hasil penelitian ini pemikiran dan pengetahuan serta memperkaya literatur perpustakaan mampu menjadi meningkatkan wawasan yang berarti mengenai pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan akibat terjadinya wanprestasi (*default risk*)